

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 November 2020/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN
SUB UNIT KERJA : DIREKTUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **JEFFRIE N KOROMPIS**
2. Jabatan : **DIREKTUR PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENGEMBANGAN BISNIS**
3. NHK : **766425**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **26.174.493.560**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 785 m²/600 m² di KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 7.083.555.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 474 m²/309 m² di KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 9.132.030.000
3. Tanah Seluas 132.24 m² di KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 9.171.650.560
4. Bangunan Seluas 35 m² di KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 787.258.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **415.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA ALPHARD Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. MOTOR, HONDA AA Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **---****D. SURAT BERHARGA** Rp. **---****E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. **10.664.523.018****F. HARTA LAINNYA** Rp. **---****Sub Total** Rp. **37.254.016.578****III. HUTANG** Rp. **716.228.695****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. **36.537.787.883**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang



diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **27 November 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.